SUARA PEMRED

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nop | Des | 2016 | Hal. : 15

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

Pemda Diminta Bentuk Regulasi Baru Dana Desa

PONTIANAK, SP – Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Bahrullah Akbar meminta setiap pemerintah daerah di Kalimantan Barat, hendaknya menyiapkan peraturan baru terkait pengelolaan anggaran, terutama dana desa.

Ini disampaikannya dalam kunjungan ke Kota Pontianak, saat dialog terbuka tentang pemantapan pemahaman pengelolaan dana desa, yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar, di Gedung Pontianak Convention Center (PCC), Kamis (13/10).

"Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sebuah laporan keuangan. Mengelola keuangan secara baik, kita mesti bekerjasama. Tujuannya untuk meningkatkan laporan keuangan yang berkualitas," ujarnya.

Peraturan baru dimaksudkan mendukung pengelolaan dana desa yang telah dikucurkan begitu besar ke pemerintah desa se-Indonesia.

Dikatakan Bahrullah, peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat sentral dalam pemeriksaan keuangan, terutama terkait pengelolaan dana desa. Hal ini tentunya bertujuan agar dana tersebut digunakan dengan baik.

Namun, dia melanjutkan, jika BPK tidak semata-mata bertugas memeriksa keuangan saja. Lebih dari itu, BPK hendaknya dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan perekonomian pula.

"Kita ini bersinergi untuk meingkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Didi Budi Satrio, dalam sambutannya mengatakan, pengetahuan aparatur dan pendamping desa dalam pengelolaan dana desa begitu penting. Sehingga laporan keuangan yang dibuat nantinya sesuai dengan yang diharapkan.

"Saya berharap peserta dialog, pendamping desa dan kepala desa se-Kalbar, supaya serius mengikuti kegiatan ini. Kita harapkan dalam pembuatan laporan keuangan nantinya betul-betul berkualitas," tuturnya.

Dialog terbuka tersebut diikuti lebih dari 400 peserta yang terdiri kepala desa dari 14 kabupaten dan kota serta pendamping desa. Selain itu dihadiri pula Sekretaris Daerah Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie, Anggota Komisi XI DPR RI, G Michael Jeno, Ketua DPRD Kalbar M Kebing L, dan tamu undangan lainnya.

Kades Tak Mau Terima Dana Desa

Di Kalbar sendiri, pengelolaan dana desa masih menuai polemik. Sebut saja seperti di Kabupaten Melawi.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik (BPMPD-Kesbangpol) setempat, Junaidi menyebutkan pengelolaan dana desa di daerahnya masih berpotensi terjadi penyimpangan.

"Sampai sekarang banyak kades yang tak pernah dilatih soal pengelolaan dana desa. Jadi banyak dari mereka yang tidak paham. Bahkan pengadaan barang dan jasa juga sama sekali mereka tidak tahu," katanya.

Akibat minimnya pelatihan serta masih belum jelasnya aturan, tidak menutup kemungkinan banyak aparatur desa yang kemudian akan terjerat persoalan hukum. Selain itu, mereka juga lemah dalam penguasaan berbagai perangkat teknologi informasi.

Sejak pengucuran dana desa tahun lalu, pemerintah pusat memang tidak serta merta memberikan bimbingan teknis kepada para pengguna anggaran yakni kades. Begitu pula dengan pendamping desa yang justru baru ada pada tahun ini.

Akibat takut salah menggunakan dana, sejumlah kepala desa tak mau menerima dana desa dengan alasan takut menggunakan atau takut masuk penjara.

Terkait ihwal ini, Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Riyono Budi Santoso mengakui banyak kades tidak memahami cara mempertanggungjawabkan penggunaan dana serta teknis pelaporan. Mereka juga diketahui belum mendapatkan bimbingan teknis yang cukup.

Menurutnya, ini adalah tugas pemerintah saat menggelontorkan uang miliaran ke desa, seharusnya diiringi bimbingan dan pelatihan, bahwa dana dipergunakan untuk pembangunan.

Pihaknya siap membantu, dan menyarankan kepada pemda agar kades ini dikumpulkan bersama pendamping desa. Sehingga kades juga paham dalam penggunaan anggaran dan tidak salah atau dipersalahkan.

Laporan penggunaan dana, menurutnya lebih banyak pada persoalan administratif, ketimbang niat jahat dari kades bersangkutan untuk memperkaya diri sendiri. Hanya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait laporan yang telah masuk ke Kejari Sintang. **(umr/eko/and)**